

Analisis Disparitas Pendapatan di kawasan Mamminasata

Author

Dahliah¹, Dwi Fajriani²

dahliah.dahliah@umi.ac.id¹, dwifajriani1997@gmail.com²

Afiliasi

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pendapatan di Kawasan Mamminasata. Skripsi ini berjudul “Analisis Disparitas Pendapatan di Kawasan Mamminasata”. Pokok masalah yang diteliti yaitu Pola dan Struktur ekonomi dan Tingkat ketimpangan di Kawasan Mamminasata. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menganalisis data sekunder, dalam hal ini bersifat tahunan dengan menggunakan rensi waktu yaitu antara tahun 2013-2017. Data yang diperoleh tersebut diolah sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan, dalam hal ini menggunakan Indeks Williamson. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, dan sumber lain sesuai kebutuhan peneliti. Hasil Analisis Indeks Williamson yaitu ketimpangan antar kabupaten di Kawasan Mamminasata secara umum meningkat dan terjadi ketimpangan yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena antara lain perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Kata Kunci: Pembangunan, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi

Pendahuluan

Pada masa sekarang ini pemerintah berupaya melakukan pembangunan dengan program dan kegiatan yang berada dalam lingkup pengembangan ekonomi lokal, telah, sedang dan akan dilaksanakan dan pada umumnya melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal tidak cukup terfokus pada pemberdayaan masyarakat, namun diharapkan inisiatif telah berada pada pemerintah daerah dalam mengidentifikasi program dan kegiatan tersebut dapat berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk mengembangkan ekonomi suatu wilayah yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal guna pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah (Bappenas, 2010)

Pada dasarnya pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat setempat mengelola sumber daya mereka dan memasuki hubungan kemitraan yang baru dengan pihak swasta untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi pada zona yang lebih tertata. Konsep pokok dari pengembangan ekonomi adalah pembangunan yang bertumpu kepada kekuatan endogen dengan memanfaatkan sumber daya manusia lokal, kelembagaan dan sumber daya fisik lokal (Dedi, 2010). Pembangunan disetiap sektor mempunyai lingkup kepentingan dan mencakup kawasan yang luas sering melintasi batas daerah/ wilayah administrasi dan sering dihadapkan pada berbagai masalah yang tidak saja sulit diatasi sendiri, tapi juga mengharuskan dilakukan kerjasama dengan daerah lain/ sekitarnya.

Pengertian dari ketimpangan pembangunan atau disparitas adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Inti permasalahan pembangunan ekonomi nasional terletak pada tingginya disparitas (kesenjangan) antar wilayah.

Adanya disparitas tersebut terjadi karena aktivitas ekonomi yang juga timpang. Di kota yang menjadi pusat bisnis, segala sarana dan prasarana tergarap dengan baik. Akan tetapi, di daerah yang bukan pusat bisnis, sarana dan prasarana tidak tergarap. Hal ini kemudian yang membuat aktivitas ekonomi jadi rendah di banyak daerah. Aktivitas ekonomi rendah, tingkat kemiskinan pun menjadi tinggi. Masalah distribusi pendapatan adalah suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya

pelaksanaan pembangunan ekonomi. Menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat. Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (Tambunan, 2001). Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Di beberapa negara tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kemiskinannya juga tinggi. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan necessary condition dan intensif yang baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Argumen dasarnya bahwa pendapatan yang tinggi pengusaha dan perorangan akan menaikkan tabungan, tabungan yang tinggi akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara ahli dan merata. Pembangunan yang dilaksanakan daerah meliputi berbagai bidang, salah satunya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi bukanlah melulu bertujuan untuk menciptakan modernisasi dalam suatu masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat tersebut. Berarti secara adil selalu di inginkan agar usaha-usaha pembangunan akan dapat dikecap oleh seluruh masyarakat secara merata. Tujuan ini tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi mengakibatkan distribusi pendapatan masyarakat menjadi semakin memburuk keadaannya. Dalam keadaan seperti ini hanya segolongan kecil saja dari keseluruhan anggota masyarakat yang menikmati hasil pembangunan (Sadono, 1996).

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Pembangunan ekonomi dimanapun pada umumnya akan mengalami suatu dilema antara kepentingan perkembangan ekonomi dan pemerataan. Perkembangan ekonomi akan menghasilkan output nasional yang akan dinikmati oleh warga negara. Pembagian output nasional dihasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang merata dapat dicapai apabila pembangunan output nasional atau hasil pembangunan ini tidak merata, hanya dinikmati oleh sebagian warga negara maka terjadi kesenjangan dalam pembagian pendapatan antar warga negara, kesenjangan ini pada gilirannya akan sangat rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya bisa menimbulkan gejolak atau konflik nasional (BPS,2006). Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dan wilayah tersebut (Lincoln,1999).

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi suatu daerah bisa saja merupakan keputusan politis maupun atas dasar kesejahteraan ekonomi masyarakat (economic welfare). Kebijakan pembangunan yang dilakukan tersebut harus didasarkan pada karakteristik daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber fisik secara lokal. Orientasi tersebut mengarahkan pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat daerah (Syafrizal, 1997)

Adelman dan Morris dalam Arsyad (2010) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu : Pertambahan Penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang- barang serta ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya. Salah satu indikator penting untuk mengetahui indikator pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data PDRB dan jumlah penduduk suatu masyarakat dipandang mengalami pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakatnya apabila pendapatan perkapita menurut harga konstan atau pendapatan perkapita riil terus-menerus bertambah.

Pembangunan wilayah dengan membentuk beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang menjadi ambisi untuk mengejar percepatan pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk mewujudkan komoditas yang dapat bersaing di pasar global. Pembangunan wilayah dengan membentuk beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang menjadi ambisi untuk mengejar percepatan pembangunan ekonomi nasional tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk mewujudkan komoditas yang dapat bersaing di pasar global dari pembentukan sistem hubungan perekonomian yang strategis dalam kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara- negara pengekspor terutama di negara maju. Pembangunan Kawasan Perkotaan merupakan salah satu strategi untuk mengkondisikan terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi melalui penyatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, dan kawasan perkotaan sekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan.

Penerapan konsep pembangunan kota terintegrasi tentunya memberi dampak perubahan yang besar pada masyarakat lokal terutama berada pada kawasan yang mengalami secara perubahan fungsi ruang tersebut, yakni tingginya frekuensi pelepasan tanah dari petani yang memiliki dan atau

mengolah lahan pertanian produktif. Lahan-lahan yang dikonversikan untuk kepentingan industrialisasi dan sarana infrastruktur dari tahun ke tahun pada akhirnya akan semakin memberikan tarikan besar bagi investor asing maupun dalam negeri demi mewujudkan ambisi pertumbuhan ekonomi wilayah.

Sebagai suatu konsep pengelolaan wilayah Metropolitan yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan serta ramah lingkungan secara berkelanjutan, tentu saja pengelolaan wilayah Makassar dan Gowa diarahkan dengan upaya-upaya pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan secara efisien dan berdaya guna, melalui keseimbangan antar wilayah dan antar sektor serta pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan lingkungan hidup. Kota Metropolitan Seperti Kota Makassar dan Kabupaten Gowa merupakan wilayah yang termasuk cukup berkembang di Sulawesi Selatan.

Seperti pada gambar dibawah, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami pertambahan dalam kemakmuran masyarakat khususnya di daerah Maminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa/Gowa dan Takalar) setiap tahunnya dimulai dari tahun 2013-2017. Jelas terlihat pada gambar Kota/Kabupaten Makassar yang mengalami pertambahan pertumbuhan yang paling banyak, begitupun yang terdapat di Kota/Kabupaten Maros juga mengalami peningkatan setiap tahunnya setelah Kota Makassar begitupun dengan pertambahan pertumbuhan peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang terdapat di Kota/Kabupaten Gowa dan Takalar.

Pemanfaatan sumber daya didaerah-daerah yang belum optimalnya merupakan salah satu sebab melebarnya jurang kesejahteraan antar daerah. Potensi dan pemanfaatan sumber daya sangat bervariasi antar wilayah dan antar provinsi bahkan antar daerah dalam provinsi itu sendiri.

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto per kapita didaerah tersebut. ketimpangan dan variasi distribusi pendapatan mempunyai hubungan positif dengan variasi distribusi penguasaan faktor-faktor produksi, keberhasilan pembangunan akan berbeda-beda antar wilayah dan provinsi, akan tetapi dengan tetap mengacu pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota masyarakat secara luas, perbedaan ini dapat dikurangi.

Jumlah penduduk adalah salah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam Smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tersebut, mengundang banyak masalah. Tetapi ini tidak berarti pada zaman dahulu masalah kependudukan tidak ada. Sejalan dengan perkembangan penduduk dunia, Indonesia juga sebagai negara berkembang yang tidak terlepas dari pertambahan penduduk yang cepat.

Pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun ini memerlukan tambahan investasi dan sarana untuk mendukung kesejahteraan rakyat seperti sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain sebagai lainnya. Hal ini tentu saja merupakan masalah bagi pemerintah dalam usahanya membangun dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya demi untuk menuju masyarakat yang sesuai dengan isi UUD 1945. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat sekarang ini sangat mempengaruhi perekonomian suatu bangsa, karena kita lihat sekarang ini kepadatan penduduk di kota-kota besar di Indonesia khususnya di kota Makassar setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi yang digunakan yaitu di kawasan Mamminasata (Maros, Makassar, Sungguminasa / Gowa dan Takalar). Penelitian akan dilakukan kurang lebih 1 bulan dari bulan Februari 2019 sampai bulan Maret 2019.

Populasi dari penelitian ini adalah di kawasan Mamminasata (Maros, Makassar, Sungguminasa dan Takalar). Data yang digunakan adalah selama lima tahun mulai dari Tahun 2013-2017.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu data kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiono (2008), metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat di klasifikasikan konkrit, termatai hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik Soendari (2013). Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

Sumber data pada penelitian ini adalah library research yang merupakan cara mengumpulkan data dari berbagai buku, jurnal skripsi, tesis, maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data tahunan selama tahun 2013-2017 dan diperoleh dari BPS serta instansi yang terkait dalam penelitian ini. Data PDRB dari masing-masing di kabuapten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, data jumlah penduduk Sulawesi Selatan.

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisa data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Data yang digunakan adalah selama lima tahun dimulai dari tahun 2013 sampai 2017.

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisa data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Path Analisis dengan menggunakan software 2.0. PLS dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal, interval, dan rasio) serta syarat asumsi yang lebih fleksibel. PLS juga digunakan untuk mengukur hubungan setiap indikator dengan konstraknya. Selain itu, dalam PLS dapat dilakukan uji *bootstrapping* terhadap struktural model yang bersifat *outer model* dan *inner model*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

PDRB dan laju pertumbuhan Ekonomi di kawasan Mamminasata

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator penunjuk adanya pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil diharapkan berperan dalam meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi sehingga merangsang bagi berkembangnya ekonomi dalam skala yang lebih besar, serta berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui besarnya perubahan statistik pendapatan

regional, atau yang lebih dikenal dengan produk domestik regional bruto (PDRB), dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan besarnya kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang terbentuk pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang dihitung berdasarkan besarnya kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang terbentuk pada tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan nilai semua barang dan jasa dengan harga tahun tertentu.

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan pendapatan atas faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah atau daerah ditambah penduduk asing yang berada di wilayah/daerah tersebut. Sejalan dengan Budiono (1981) yang menyatakan bahwa PDRB adalah seluruh nilai netto barang dan jasa (komoditas) yang diproduksi pada suatu wilayah domestik regional tanpa memperhatikan pemilikan faktor-faktor produksi pada suatu wilayah domestik/regional tersebut. Kawasan perkotaan Mamminasata yang terdiri dari kabupaten Maros, kota Makassar, kabupaten Gowa dan kabupaten Takalar adalah merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) diantara kawasan ekonomi lain yang ada di Indonesia. Besarnya skala ekonomi kawasan perkotaan Mamminasata tercermin melalui besaran PDRB selama periode tahun 2013 sampai 2017, seperti berikut :

Tabel 1. PDRB. Atas harga dasar konstan di Kawasan Mamminasata tahun 2013-2017 (jutaan rupiah)

Kabupaten Kota	PDRB				
	2013	2014	2015	2016	2017
Maros	9.612.26	10.066.82	10.916.73	11.970.39	12.768.32
Makassar	76.907.41	82.592.8 2	88.828.15	95.960.51	103.857.09
Gowa	9.070.00	9.720.17	10.380.22	11.169.73	11.977.30
Takalar	4.144.29	4.549.02	4.931.54	5.405.32	5.804.57

Berdasarkan tabel 1 bahwa selama periode 2013-2017 seluruh kabupaten yang berada di Kawasan Mamminasata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di lihat dari tabel 5.1 bahwa nilai PDRB (jutaan rupiah) yang paling banyak di miliki oleh Kota Makassar pada tahun 2013 nilai PDRB sebanyak 76.907.41 dan meningkat hingga tahun 2017 sebanyak 103.857.09, Yang kedua Kabupaten Maros pada tahun 2013 nilai PDRB sebanyak 9.612.26 dan mengalami peningkatan hingga 2017 sebanyak 12.768.32 dan yang ketiga di miliki oleh kabupaten Gowa nilai PDRB pada tahun 2013 sebanyak 9.070.00 dan juga setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebanyak 11.977.30 yang terakhir atau yang paling sedikit dimiliki oleh kabupaten Takalar nilai PDRB tahun 2013 sebanyak 4.144.29 dan meningkat hingga tahun 2017 sebanyak 5.804.57.

Tabel 2. PDRB perkapita atas harga konstan 2010 dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Mamminasata tahun 2013 – 2017 (persen)

Kabupaten	PDRB per Kapita				
	2013	2014	2015	2016	2017
Maros	36.07	40.71	46.47	52.11	56.16
Makassar	62.75	70.25	78.77	87.39	96.12
Gowa	15.50	16.98	19.03	21.11	23.08
Takalar	17.83	20.73	23.74	26.75	29.27
	Pertumbuhan Ekonomi				
Maros	6.28	4.73	8.58	9.52	6.81
Makassar	8.55	7.40	7.44	7.99	8.23
Gowa	9.42	6,94	6.80	7.63	7.23
Takalar	8.80	9.00	8.41	9.61	7.39

Berdasarkan tabel 2 bahwa PDRB per kapita yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, berbeda dengan laju pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda dari tahun ke tahun. Daerah yang laju pertumbuhannya yang paling tinggi di tahun 2013 dimiliki oleh Kabupaten Gowa yaitu 9,42% lalu yang kedua kabupaten Takalar 8,80% dan yang ketiga dimiliki oleh kota Makassar 8,55% dan kabupaten Maros 6,28 % di tahun 2014 laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu Takalar 9,00% , Kota Makassar 7,40%, Kabupaten Gowa 6,94% dan kabupaten Maros 4,73% di tahun 2015 laju pertumbuhan yang paling tinggi dimiliki oleh kabupaten Maros yaitu 8,58% lalu Takalar 8,41% Makassar 7,44% Gowa 6,80% di tahun 2016 laju pertumbuhan yang paling tinggi kabupaten Takalar 9,61% Maros 9,52% Makassar 7,99% Gowa 7,63% dan di tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi yaitu Kota Makassar 8,23% Takalar 7,39% Gowa 7,23% dan terakhir Kabupaten Maros 6,81%.

Kabupaten Maros mengalami peningkatan pertumbuhan karena ada beberapa sektor kegiatan ekonomi yang mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi, seperti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kemudian sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Maros cukup besar, sehingga apabila sektor ini digerakkan atau dinaikkan pertumbuhannya maka dampaknya terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi juga cukup besar.

Pendapatan per kapita di Kota Makassar terus mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena adanya pertumbuhan positif dari sektor-sektor ekonomi, terutama sektor industri, pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kabupaten Gowa, tidak jauh berbeda dengan daerah lain dalam lingkup Sulawesi selatan, dimana sektor pertanian masih merupakan sektor primer yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB kabupaten Gowa,

dan tentunya berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja lebih banyak pada sektor tersebut. Kabupaten Takalar sendiri sebagai kabupaten yang memiliki berbagai potensi pengembangan baik dari segi infrastruktur, potensi pasar, tenaga kerja, dan sumber daya alam telah mengalami pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi.

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk kota Makassar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa sebagai kota induk diantara daerah lain di kawasan Mamminasata, kota Makassar mengalami pertumbuhan yang dinamis dari tahun ke tahun. Hal ini didasari oleh 3 hal yakni mortalitas (kematian), natalis (kelahiran) dan migrasi (perpindahan).

Pola dan Struktur Ekonomi di Kawasan Mamminasata

Untuk mengetahui klasifikasi daerah didasarkan kepada dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita. Dengan menentukan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horizontal, sedangkan daerah per kabupaten dibagi menjadi empat golongan yaitu kabupaten yang cepat maju dan cepat tumbuh, kabupaten maju tapi tertekan, kabupaten yang berkembang cepat dan kabupaten yang relatif tertinggal. (Sjafrizal, 1997; Mudrajat Kuncoro dan Aswandi, 2002).

Selama tahun 2013-2017, rata-rata PDRB Per kapita kawasan mamminasata sebesar 42,04. Daerah yang tertinggi diatas rata-rata Kawasan Mamminasata adalah Kota Makassar sebesar 79,09 dan kedua Kabupaten Maros sebesar 46,30. Sedangkan yang terendah dimiliki oleh kabupaten Gowa sebesar 19,12 dan Kabupaten Takalar yakni sebesar dan 23,66.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur hasil pembangunan suatu daerah. Berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kota makassar dan Maros menjadi kecamatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi dari daerah lainnya. Kota Makassar memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup besar pada tahun 2017 dan kabupaten Maros pada tahun 2016 dan 2017 pertumbuhannya paling tinggi di bandingkan dengan Gowa dan Takalar.

Selama tahun 2013-2017, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kawasan mamminasata sebesar 7,88. Daerah yang laju pertumbuhannya berada di bawah rata-rata Kawasan Mamminasata adalah Kabupaten Maros sebesar 7,18, dan diatas rata-rata kawasan Mamminasata yaitu Kota Makassar 7,92 dan Kabupaten Takalar 8,79 . Sedangkan yang terendah dimiliki oleh kabupaten Gowa sebesar 7,65 .

Tingkat Ketimpangan antar Kabupaten di Kawasan Mamminasata

Berdasarkan hasil perhitungan angka Indeks Williamson, bahwa ketimpangan yang terjadi antara Kabupaten di Kawasan Mamminasata menurut Indeks Williamson yang paling tinggi terjadi pada Kabupaten Gowa pada tahun 2013 yaitu 0,46 dan pada tahun 2014 masih sama dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 yaitu 0,465.

Yang kedua terjadi pada kota Makassar pada tahun 2013 yaitu 0,315 tahun 2014 yaitu 0.316 tahun 2015 yaitu 0,3142 dan pada tahun 2017 yaitu 0,314.

Yang ketiga Kabupaten Takalar pada tahun 2013 yaitu 0,308 tahun 2014 yaitu 0,307 pada tahun 2015 yaitu 0,3065 tahun 2016 yaitu 0,3058 tahun 2017 yaitu 0,3053.

Yang terakhir terjadi pada Kabupaten Maros pada tahun 2013 yaitu 0,165 tahun 2014 yaitu 0,164 tahun 2015 yaitu 0,1641 tahun 2016 yaitu 0,165 dan pada tahun 2017 yaitu 0,1637.

Dapat dilihat bahwa kabupaten yang mengalami ketimpangan paling tinggi terjadi pada kabupaten Gowa yang kedua Kota Makassar, Selanjutnya Kabupaten Takalar dan terakhir Kabupaten Maros.

Ukuran ketimpangan jika nilai Indeks Williamson mendekati 0 artinya di daerah tersebut ketimpangan kecil atau lebih merata dan apabila nilai Indeks Williamson mendekati 1 maka daerah tersebut terjadi ketimpangan yang sangat besar atau melebar.

Ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Kawasan Mamminasata sangat melebar, maka bisa kita lihat bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin meningkat, kemungkinan hal tersebut terjadi karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga pembangunan tidak bisa diterima secara merata di setiap wilayah kabupaten. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan ketimpangan pada suatu wilayah yaitu :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam, Penyebab utama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing daerah.
2. Perbedaan kondisi demografis, Faktor utama lainnya yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah.
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang di sponsori pemerintah, transmigrasi atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan.
4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah, Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan yakni: 1) Ketimpangan yang terjadi di Kawasan Mamminasata periode 2013-2017 antar kabupaten pada periode tersebut terjadi ketimpangan yang cukup tinggi terjadi pada Kabupaten Gowa, yang kedua Kota Makassar dan ketiga terjadi pada Kabupaten Takalar dan terakhir Kabupaten Maros. 2) Berdasarkan pada uraian diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Maros mengalami ketimpangan yang paling rendah di Kawasan Mamminasata.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 1) pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunannya agar memprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal, dan daerah yang maju tapi tertekan. 2) Pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur agar lebih merata dan menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan dan investasi.

Referensi

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Kelima. BPFE. Yogyakarta.
- Boediono, 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE Yogyakarta.
- BPS Sulawesi Selatan. 2017. **Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017**.
- Bappenas. 2010. *Bantuan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal*. Direktorat Perkotaan dan Pedesaan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Departemen Agama RI. *Qur'an Tajwid Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006. Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah – Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga.
- Lincolin, Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Mudrajad, Kuncoro. 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, AMP YKPN, Yogyakarta.
- Prayitno, Teguh. 2009. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2000-2006*.
- Riadi, R.M. 2006. **Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Propinsi Riau**. FKIP Universitas Riau.
- Riskaamelia, Ayu. *“Laju pertumbuhan penduduk terhadap perekonomian Indonesia”*, diakses dari <https://ayuriskaamelia.wordpress.com/soft-skill/>.
- Rudi. 1999. *“Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang periode 2000-2004”*, FE UNDIP, Semarang
- Sadono, Sukirno. 1996. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, LPFE UI, Jakarta.
- Soendari, Tjuju. *Teori-teori Penelitian*. Surabaya: Erlangga, 2013
- Syafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Majalah Prisma . No.3 Maret 1997, LP3ES.
- Sjahrijal. 2008. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Praninta Offset. Padang
- Sudarmono, Mulyanto. 2006. *Transformasi Struktural Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah di Wilayah Pembangunan Jateng I*. (Tesis). Universitas Diponegoro Semarang.
- Siregar, Budi Basa. 2012. *“Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi di Provinsi Sumatra Utara.”*Diaksesdari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20297755T30065Budi%20Basa%20Siregar.pdf>.
- Tambunan, Tulus. 2001. **Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris**. PT.Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Todaro, Michael. 1999. *Perkembangan Ekonomi Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.

Todaro, M.P dan S.C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kesembilan Jilid 1. Erlangga : Jakarta. Yamin, Sofyan. 2011. *Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling*. Penerbit: Salemba Infotek, Jakarta